

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PENGELOLAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN
TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



LIRA FITRIANI
NPM 167310670

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Lira Fitriani
NPM : 167310670
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

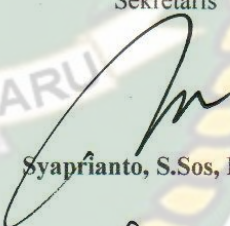
Nama : Lira Fitriani
NPM : 167310670
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu
Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan
Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

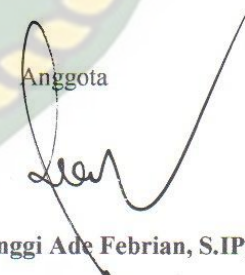
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP M.S.Si

Sekretaris

Syaprianto, S.Sos, M.IP

Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 424/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
4. SK Rektor UIR Nomor 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor 147/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini

Nama : Lira Fitriani
N P M : 1673100670
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Struktur Tim

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Rizki Setiawan, S.IP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

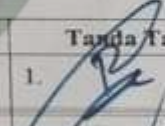
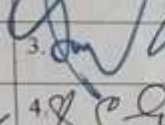
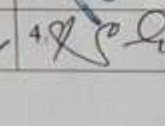
7. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
8. Yth. Ketua Prodi.....
9. Arsip -----sk penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 46 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 13 April 2022 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Lira Fitriani
NPM : 167310670
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
5.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 April 2022
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lira Fitriani
NPM 167310670
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu
Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Rizky Setiawan, S.IP, M.S.Si

Syaprianto, S.Sos, M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”.

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerja sama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi,SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal L, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Risky Setiawan, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penulisan usulan penelitian ini;

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik;
7. Teman-teman seperjuangan serta para senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penelitian selanjutnya lebih sempurna.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, Aamin

Pekanbaru, 20 juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. StudiKepustakaan.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Konsep Operasional	36
E. Operasional Variabel	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. TipePenelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan dan Key Informan.....	40
D. Teknik dan Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	41
F. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian	43
B. Penduduk	44
C. Gambaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu	45
D. Struktur Organisasi Kantor Disnakhbun Kabupaten Rokan Hulu.....	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	58
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.....	61
C. Hambatan-hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	77

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel I.1 Luas Kebun Swadaya Berdasarkan Kecamatan.....	9
Tabel I.2 Luas Kebun Perusahaan Berdasarkan Kecamatan.....	10
Tabel I.3 Perbandingan Luas Perkebunan antara Data Dan Lapangan	13
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel II.2 Operasional Variabe	38
Tabel III.1 Informan dan Key informan penelitian	40
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan penelitian	42
Tabel IV.1 Tabel Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu.....	44
Tabel IV.2 Persebaran Penduduk Kabupaten Rokan Hulu	45
Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur	60
Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.	60

DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa
Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu _____36
- Gambar IV.1 Struktur Organisasi Perangkat Dinas Peternakan Dan Perkebunan
Kabupaten Rokan Hulu52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara untuk Disnakhun Kabupaten Rokan Hulu	86
2. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat/ Pemik kebun	93
3. Dokumentasi Foto Hasil Observasi Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.....	95
4. Surat Tanda Telah Melaksanakan Penelitian di DISNAKBUN Kabupaten Rokan Hulu.....	98
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau	99
6. Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu.....	100
7. Surat Riset	101
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	102
9. Sertifikat Bimbingan Baca Qur'an UIR.....	103
10. Matrix Revisi Skripsi	104

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lira Fitriani
NPM : 167310670
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfhensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau secara keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sangksi pembatalan hasil ujian konfhensif yang telah saya ikuti serta sangsi lainnya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

Pelaku Pernyataan,

Lira Fitriani

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ROKAN
HULU DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Oleh :

Lira Fitriani

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas terpenting dan strategis serta peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman primadona terutama masyarakat kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu yang mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat mulai membuka lahan secara besar-besaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perkebunan kelapa sawit dilakukan pemerintah daerah kabupaten rokan hulu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif . Indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Indikator Menetapkan Alat Pengukur (Standar), Mengadakan Penilaian, dan Mengadakan Perbaikan. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara kualitatif, observasi kualitatif, dan dokumen-dokumen kualitatif. Teknik penarikan informan dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan snow ball yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk menggantinya dengan informan lain apabila jawabannya masih simpang siur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum baik dan berjalan sesuai standar yang ditetapkan karena beberapa faktor seperti kinerja pengawasan yang belum sesuai dengan standar sehingga belum terjadwalnya kegiatan pengawasan secara efektif, kurangnya biaya,waktu dan sdm dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan, dan kurang tegas untuk menindaklanjuti oknum yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci : *pengawasan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Kelapa Sawit*

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF PLANTATION SERVICES IN ROKAN HULU REGENCY IN OIL PALM PLANTATION MANAGEMENT IN TAMBUSAI DISTRICT ROKAN HULU REGENCY

ABSTRACT

By :

Lira Fitriani

Oil palm plantations are one of the most important and strategic commodities and have a fairly large role in encouraging the people's economy to make oil palm a prima donna crop, especially the people of the Tambusai sub-district, Rokan Hulu district, which has resulted in more and more people starting to open land on a large scale. Analyze the supervision of the management of oil palm plantations carried out by the local government of the Rokan Hulu district and to find out the inhibiting factors for oil palm plantations carried out by the Rokan Hulu district government in accordance with existing regulations. This method uses qualitative research methods, the research indicators used in this study are indicators of setting measuring instruments (Standards), conducting assessments, and conducting improvements. This research was conducted at the office of animal husbandry and plantation, Rokan Hulu Regency, and qualitative documents. Informant withdrawal technique is carried out using snow ball withdrawal technique, namely the determination of several people as informants and it is possible to replace them with other informants if the answers are still ambiguous. Upstream in the management of oil palm plantations in Tambusai district, Rokan Hulu Regency has not been good and is running according to the standards set due to several factors such as monitoring performance that is not in accordance with the standards. As so that effective supervision activities have not been scheduled, lack of time and human resources in carrying out supervisory activities, and lack of firmness in following up on individuals who commit irregularities in the management of oil palm plantation.

Supervision Keyword : Supervision, Department of Animal Husbandry and Plantation of Rokan Hulu Regency, Palm oil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara republik indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik dipusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibaginya wilayah negara republik indonesia kedalam wilayah besar dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan. Guna menindaklanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 angka 6 memberikan definisi otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan sistem negara kesatuan republik indonesia. Pada

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 11 ayat (1) terdapat urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan salah satu tugas dari pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan pilihan adalah pertanian. Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan identik sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian disektor bercocok tanam atau pertanian. Di bidang agrikultur, indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya, seperti biji coklat, karet, cengkeh, dan terutama kelapa sawit. indonesia merupakan negara agraris yang tanahnya subur, beriklim tropis, sehingga dapat menanam sepanjang tahun, serta kandungan perut bumi yang kaya, seperti gas, minyak, batu bara, timah, emas dan tambang lainnya. Maka indonesia sesungguhnya mempunyai kekuatan ekonomi yang besar untuk tampil menjadi negara yang makmur.

Salah satu bentuk kekuatan ekonomi indonesia yaitu di bidang agroindustri perkebunan kelapa sawit. Perkebunan di indonesia secara khusus diatur dalam

undang-undang nomor 18 tahun 2004 adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian termasuk didalamnya pembangunan perkebunan.

Kelapa sawit (*elaeis guineensis jacq*) merupakan salah satu palmae yang menghasilkan minyak nabati terbesar di dunia yakni sebesar 2000-3000 kg/ha/tahun, dibandingkan dengan kelapa yang hanya mencapai 700-1000 kg/ha/tahun. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak sawit yang biasa dikenal sebagai crude palm oil (cpo) yang berasal dari daging buah dan palm kernel oil (pko) yang berasal dari inti sawit. Minyak sawit mentah (cpo) merupakan produk perkebunan yang memiliki prospek cerah dimasa mendatang. Kedua minyak tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan seperti margarin,minyak goreng, kosmetik, sabun, dan detergent. Selain itu, kelapa sawit juga dapat digunakan sebagai biodiesel yang merupakan energy alternative pengganti minyak bumi. Manfaat minyak sawit yang cukup beragam tersebut menyebabkan meningkatnya konsumsi minyak sawit sehingga juga meningkatkan permintaan produk minyak sawit. Peningkatan konsumsi minyak sawit dapat diketahui dari semakin meningkatnya volume ekspor minyak sawit pada setiap tahun.

Pertumbuhan sub-sektor kelapa sawit telah menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan pemerintah bagi kepentingannya untuk mendatangkan investor asing ke indonesia. Namun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan indonesia. Konversi hutan alam masih terus berlangsung hingga

kini bahkan semakin menggila karena nafsu pemerintah yang ingin menjadikan indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Prakteknya pembangunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan dikawasan konversi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Akibatnya bisa dipastikan indonesia mendapat ancaman hilangnya keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan hujan tropis. Juga menyebabkan hilangnya budaya masyarakat disekitar hutan. Aktivitas perkebunan kelapa sawit seringkali menimbulkan dampak tertentu bagi kelestarian lingkungan karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi.

Laju perkembangan industry kelapa sawit indonesia merupakan hasil dari kombinasi beragam faktor. Sebagai komoditi perkebunan, sawit merupakan tanaman yang sangat produktif yang mampu menghasilkan 7 kali lebih banyak dari minyak rapeseeds (*Brassica napus*) dan 11 kali lebih banyak dari kedelai perhektare. Faktor-faktor lain terkait kondisi ekonomi Indonesia. Perkembangan perkebunan sawit memiliki hubungan yang signifikan dengan industry penebangan (*logging*), penggabungan aktivitas *logging* dengan kelapa sawit yang cepat tumbuh menciptakan model bisnis yang sangat menguntungkan. Penebangan kayu menghasilkan pendapatan hingga \$10.000 per hectare, yang cukup untuk memberikan modal awal untuk mengkonversi lahan masih lebih menguntungkan perkebunan kelapa sawit. Tingginya permintaan minyak sawit telah menyebabkan budidaya bergeser dari metode subsisten tradisional, yaitu penanaman lewat

system pertanian skala kecil, menjadi satu-satunya tanaman homogeny yang ditanam dalam perkebunan luas.

Saat ini, industry kelapa sawit Indonesia terus tumbuh pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Indonesia memiliki 8,1 juta hectare perkebunan kelapa sawit, sekitar 37 persen yang didirikan diatas tanah gundul. Dlam jumlah areal diproyeksikan mencapai 13 juta hectare pada tahun 2020. Sebagai bentuk perkebunan yang terus berkembang, sawit beresiko terhadap laju kerusakan hutan. Salah satu alasan mengapa pertumbuhan sawit tidak terkendali saat ini adalah ketidakmampuan pemerintah pusat untuk menjangkau berbagai tata kelola lahan ditingkat local, dimana sebagian besar perkebunan sawit masih berada dibawah kendali jejaring de facto dari pejabat setempat. Selain itu, perencanaan penggunaan lahan dan pemetaan yang lemah sering membuat pemerintah pusat tidak mampu untuk mengungkap tujuan dari penggunaan lahan. Berikut merupakan dampak negative dan positif dari perkebunan kelapa sawit.

Dampak positive :

- 1) Meningkatnya pembangunan didaerah seperti dibangunnya akses jalan dari perkebunan ke pusat kota yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar.
- 2) Pendapatan perkapita daerah naik. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan perkebunan kelapa sawit.
- 3) Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pekerja, mereka juga mambangun pusat layanan kesehatan dan pendidikan terpadu. Meskipun kualitasnya masih dibawah standar, diperlukan fasilitas yang cukup berguna bagi warga sekitar.

- 4) Mengurangi angka pengangguran di sekitar masyarakat yang tinggal di perkebunan sawit.
- 6) Peningkatan pendapatan rumah tangga dan peningkatan daya beli masyarakat.
- 7) Meningkatkan daya saing serta produktivitas.
- 8) Meningkatkan pendapatan negara

Namun,realitanya perkebunan kelapa sawit lebih banyak memberikan dampak negative seperti :

1. Persoalan tata ruang, dimana monokultur, homogenitas, dan verloads konversi, hilangnya keanekaragaman hayatiini akan memicu kerentanan kondsi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.
2. Pembukaan lahan seringkali dengan cara tebang habis dan land clearing dengan cara pembakaran demi efisiensi biaya dan waktu.
3. Kerusakan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti sawit, dimana dalam satu hari satu batang sawit bisa menyerap 12 liter. Disampng itu pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya.
4. Munculnya hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan menarik habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. ini disebabkan karena keterbatasan lahan jenis tanaman akibat monokulturas.

5. Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah sembarangan, seperti mengalirkannya ke sungai yang merupakan sumber terpenting bagi manusia sebagai air minum, mandi, dan lain-lain.
6. Terjadinya konflik horizontal vertical akibat masuknya perkebunan kelapa sawit. Seperti konflik antar warga yang menolak dan menerima masuknya perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat pemerintah akibat system perizinan perkebunan sawit.
7. Terjadinya konflik ekologi pada tanah, ekonomi, dan sosial budaya pada masyarakat.
8. Sering terjadinya konflik agraria pada sektor perkebunan kelapa sawit dan konflik lahan.
9. Memuat terjadinya pemanasan global sehingga membuat pencemaran udara.
10. Banyak limbah sawit membuat kerusakan lingkungan.

Berikut tindakan atau sanksi dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan seperti :

- a) Peringatan
- b) Penghentian sementara kegiatan berusaha
- c) Pengenaan denda administratif, dan / atau
- d) Pencabutan perizinan berusaha.

Riau merupakan sebagai penghasil kelapa sawit terluas di Indonesia. Terutama bagi kabupaten Rokan Hulu, karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas terpenting dan strategis serta peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman primadona bagi masyarakat di pedesaan Rokan Hulu, salah satunya daerah kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu untuk membuka usaha tani dan memiliki kebun kelapa sawit, maka luas kelapa kebun sawit dimasa datang diprediksi akan selalu bertambah. Padahal sejumlah komoditas pertanian seperti coklat atau kakao, gambir, pinang serta kopi sebenarnya juga menjadi andalan daerah kecamatan Tambusai disektor pertanian, terutama karet yang pernah mengalami puncak kejayaan pada tahun 1970-an ketika harga karet sempat menyentuh angka tertinggi pada kisaran Rp 300/kg. Hingga komoditas karet sempat mengalami perlambatan pada tahun 1998 karena harga karet yang mulai fluktuatif. Pada periode 2004-2013 akhir komoditas ini sempat mengalami kenaikan harga lagi, namun pada tahun 2014 harga karet kembali anjlok hingga 25% dari harga normal. Petani karet banyak menderita kerugian dan mulai melihat sawit sebagai alternatif komoditas budidaya. lahan-lahan perkebunan karet dan pinang yang dianggap kurang produktif perlahan mulai diganti dengan sawit. karena kurang digarap secara serius dan terkendala di bidang pemasaran, petani pun beralih ke komoditas lainnya. Terkait adanya pembukaan usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat setempat, kemudian sebagai bentuk untuk mempermudah masyarakat dalam membuka usaha taninya maka pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu membuat peraturan daerah (perda) kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2011

tentang retribusi jasa usaha. Yang berbunyi “pasal 1 ayat 30” retribusi penjualan usaha produksi daerah adalah retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain : air bersih, bibit karet, bibit kelapa sawit dan benih ikan.

Penggunaan lahan untuk wilayah perkebunan sangat mendominasi wilayah kabupaten rokan hulu. Sekitar 78% dari penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018 merupakan lahan perkebunan dimana 45% terindikasi sebagai lahan perkebunan rakyat dan 55% dalah lahan perkebunan besar swasta atau milik PTPN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Luas indikatif perkebunan rakyat/swadaya diperkirakan mencapai 345.349,69 hektare, yang tesebar hampir disemua kecamatan di Rokan Hulu. Jika dirinci lebih jauh menurut komoditasnya, pembagian luas perkebunan rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Luas kebun swadaya berdasarkan kecamatan di Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jenis Komoditas					Total	Kepadata n Perkebun an
		Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Kakao	Aren		
1	Bangun Purba	10.683,71	3.54,40	-	-	-	14.038,11	88%
2	Bonai Darussalam	29.193,19	105,75				29.298,93	24%
3	Kabun	15.449,04	2.412,43				17.861,46	48%
4	Kepenuhan	10.553,00	3.312,91				13.865,90	29%
5	Kepenuhan Hulu	13.426,35	4.301,51				17.727,86	64%
6	Kunto Darussalam	20.089,12	542,20				20.631,33	35%
7	Pagarantapah Darussalam	4.196,00	197,95				4.393,95	28%
8	Pendalian IV Koto	2.809,55	7.027,78				9.837,32	45%
9	Rambah	5.088,96	12.156,51				17.245,47	50%
10	Rambah Hilir	9.849,80	13.479,86		0,61		23.330,28	89%
11	Rambah Samo	16.839,26	10.796,16		0,15		27.635,57	75%
12	Rokan IV Koto	12.855,74	6.330,06	3,19	0,02	9,75	19.198,76	21%
13	Tambusai	41.984,38	6.441,80			-	48.426,18	71%
14	Tambusai Utara	51.265,40	7.576,76			-	58.842,16	47%
15	Tandun	16.653,66	1.486,88			17,01	18.157,52	56%
16	Ujung Batu	4.008,90	849,99			-	4.858,88	61%
Total		264.946,02	80.372,94	3,19	0,78	26,76	345.349,69	45%

(sumber : Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat jelas bahwa kepadatan perkebunan rakyat secara umum adalah sebesar 45% yang mengindikasikan persentase luas penggunaan lahan perkebunan rakyat terhadap keseluruhan luas kabupaten. Perkebunan rakyat/swadaya relatif merata disemua kecamatan, namun areal yang cukup luas dapat dijumpai di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara. Selain karena ketersediaan lahan, keberadaan pabrik milik perkebunan besar khususnya pabrik minyak kelapa sawit menjadi stimulan berkembangnya perkebunan rakyat/swadaya di lokasi-lokasi tersebut.

Sedangkan area lahan perkebunan dengan status pengelolaan atau penguasaan dibawah perkebunan swasta besar diperkirakan mencapai 253.663,97 hektare atau sekitar 42 persen dari seluruh lahan perkebunan di kabupaten rokan hulu. Persebaran lahan perkebunan milik perusahaan besar tersebar hampir diseluruh wilayah kabupaten rokan hulu, kecuali di kecamatan bangun purba, rambah, dan kecamatan rambah hilir.

Pembagian luas perkebunan perusahaan/swasta sebagai berikut :

Tabel 1.2 Luas perkebunan perusahaan/swasta berdasarkan kecamatan di rokan hulu

No	Kecamatan	Jenis Komoditi					Total	Kepadatan
		Kelapa Sawit	Karet	Kelapa	Kakao	Aren		
1	Bangun purba	-	-	-	-	-	-	0%
2	Bonai Darussalam	66.076,14	-	-	-	-	66.076,14	53%
3	Kabun	10.297,73	-	-	-	-	10.297,73	27%
4	Kepenuhan	28.807,18	6,70	-	-	-	28.813,88	61%
5	Kepenuhan Hulu	8.339,38	65,25	-	-	-	8.404,63	30%
6	Kunto Darussalam	35.788,67	-	-	-	-	35.788,67	60%
7	Pagaran tapah Darussalam	10.217,34	1,89	-	-	-	10.219,23	66%
8	Pendalian IV Koto	5.261,74	-	-	-	-	5.261,74	24%
9	Rambah	-	-	-	-	-	-	0%
10	Rambah Hilir	-	-	-	-	-	-	0%
11	Rambah Samo	3.035,75	10,60	-	-	-	3.046,34	8%
12	Rokan IV Koto	1.374,34	-	-	-	-	1.374,34	1%
13	Tambusai	11.259,36	145,05	-	-	-	11.404,41	17%
14	Tambusai	61.425,52	10,14	-	-	-	61.435,66	49%

	Utara							
15	Tandun	8.695,51	1.163,48	-	-	-	9.858,99	31%
16	Ujung Batu	1.660,04	22,17	-	-	-	1.682,21	21%
	Total	252.238,69	1.425,28	-	-	-	253.663,97	33%

(sumber : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas terlihat jelas bahwa kepadatan perkebunan perusahaan/swasta secara umum adalah sebesar 33% yang mengindikasikan persentase luas penggunaan lahan perkebunan rakyat terhadap keseluruhan luas kabupaten. Perkebunan perusahaan/swasta tidak merata disemua kecamatan, seperti dikecamatan bangun purba, rambah, rambah hilir tidak terdapat perkebunan kelapa sawit, hal ini karena ketersediaan lahan lebih mendominasi perkebunan swadaya/rakyat dilokasi-lokasi tersebut.

Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantua di bidang prasarana , sarana dan perbenihan, pengembangan tanaman dan penyuluhan,pengolahan,pemasaran dan pembinaan usaha,serta perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Dinas Perkebunan adalah :

1. Perumusan kebijakan pada sekretariat,bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebunan, bidang sarana, dan pembinaan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan pada secretariat, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebuna, bidang sarana prasarana, dan pembinaan sumber daya manusia;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada secretariat, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebunan, bidang sarana prasarana dan pembinaan sumber daya manusia;
4. Pelaksanaan administrasi pada secretariat, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebunan, bidang sarana prasarana, dan pembinaan sumber daya manusia;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; Berdasarkan peraturan bupati rokan hulu yang dibuat dengan nomor urut 64 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas peternakan dan perkebunan, adapun tugas dan fungsi dari dinas peternakan dan perkebunan adalah sebagai berikut :
 1. Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang peternakan dan perkebunan.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DISNAKBUN.

Keberadaan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap pegawai yang ada dalam dinas ini untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan

baik, agar pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat berjalan baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tulisan atau lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung adalah sering para bawahannya hanya melaporkan hal-hal positif saja. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu dengan cara seperti ini tidak efektif, karena hanya berdasarkan laporan-laporan yang diberikan oleh perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali sesuai Peraturan Menteri nomor 98 tahun 2013. Meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan perizinan bidang usaha perkebunan sudah dibuat sebaik-baiknya, namun dalam pengawasannya tidak sesuai dengan diharapkan pasalnya masih banyak pihak perusahaan memberikan laporan per enam bulan tidak sesuai jadwal, bahkan ada perusahaan yang tidak memberikan laporan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Standar dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu seharusnya meliputi menyusun kebijakan, menentukan standar waktu dalam pengawasan, sosialisasi dan adanya pembagian tugas dalam pengawasan.

Namun pada kenyataannya Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dirasa belum berjalan secara optimal dalam melaksanakan tugasnya. Dinas Perkebunan

Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut terlihat pada tahun 2018, perbandingan antara hasil data aktual dilapangan dengan data statistik yang dihasilkan selama ini menunjukkan indikasi selisih yang cukup besar sekitar 23,38%. Tabel dibawah ini menunjukkan selisih hasil data aktual dilapangan dengan data statistik tahun 2018.

Tabel 1.3: Perbandingan luas perkebunan antara data statistik dengan data aktual di lapangan

No	Komoditas	Luas Komoditas (Ha) berdasarkan sumber data		Selisih (%)
		Statistik 2018	Data Lapangan 2018	
1.	Kelapa Sawit	210.873,00	264.946,02	20,41%
2	Karet	52.365,00	80.372,94	34,85%
3	Kelapa	986,00	3,19	99,68%
4	Kakao	196	0,78	99,60%
5	Kopi	184	0,00	100,00%
6	Aren	0	26,76	100,00%
Jumlah		264.604,00	345.349,69	23,38%

(Sumber : Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat jelas bahwa selisih untuk komoditas sawit dan karet berturut-turut adalah sebesar 20,41 dan 34,85%. Mengingat hasil uji akurasi data aktual dilapangan yang cukup tinggi, maka cukup besar kemungkinan data hasil aktual dilapangan yang mendekati kondisi yang sebenarnya dilapangan. Selain itu, ruang kesalahan juga masih mungkin terjadi dalam pemisahan antara perkebunan rakyat/swadaya dengan perkebunan besar swasta/BUMN.

Dari data tersebut sangat jelas bahwa dinas perkebunan Kabupaten Rokan Hulu belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat fenomena yang terjadi dilingkungan kita yang mendukung untuk dilakukannya penelitian yaitu :

1. Lemahnya pengawasan dinas perkebunan kabupaten rokan hulu terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan tambusai.
2. Lemahnya sanksi yang diberikan oleh dinas perkebunan dalam pengelolaan kawasan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat “**Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**”

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan juga didasar pada penjelasan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu : bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perkebunan kelapa sawit dilakukan pemerintah daerah kabupaten rokan hulu sudah sesuai dengan aturan yang ada.

2. kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam pengawasan.

- b. Secara praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi dinas perkebunan dalam pelaksanaan pengawasan dnas perkebunan kabupaten rokan hulu dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit di kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.

- c. Secara akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang melaksanakan penelitian dibidang yang sama dengan masalah penelitian.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang susulan penelitian, penulis memaparkan teori yang menjadi bahan pendukung dan sangat diperlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.

1. Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memecahkan permasalahan, maka diperlukan teori atau pengertian dari pemerintah agar mempermudah untuk memperoleh hasil-hasil yang objektif, untuk itu penulis mengemukakan pendapat mengenai pengertian ilmu pemerintahan itu sendiri.

a. Pengertian pemerintahan

Pemerintah secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsu-unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tgas pemerintahan tersebut. oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah tidak lain adalah

menjabarkan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh perundang-undangan.

Menurut Munaf, yusri (2016:47) mengatakan pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

Menurut talizduhu ndraha (dalam rahyunir rauf 2018:9) bahwa pemerintahan adalah suatu gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik antar individu, kelompok dengan kelompok.

Masih menurut Taliz ndaraha (dalam rahyunir rauf 2018:10) bahwa pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Ndaraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan masyarakat.

Menurut Syafe'i (2001:21) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan. pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

b). Pemerintahan Sebagai Ilmu

Ndaraha (2011:364) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan.

Menurut Sumedar (dalam inu kencana syafi'e, 2016:136) Ilmu pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntunan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat, serta keberadaan legitimasi.

c). Pemerintah

Menurut Sumaryadi (rahyunir rauf 2018:15) pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta uu di wilayah tertentu.

Menurut Ndraha (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Napitupulu (2012:9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada 4 unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- 1) Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- 2) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
- 3) Hal yang diperintah mempunyai keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- 4) Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun secara horizontal (syafi'e 2001:43-44).

Menurut Syafe'I (2001:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintah sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu sistematis dan spesifik, universal, memiliki objek dan dapat dipelajari dan diajarkan.

Menurut Sumaryadi (maulidiah 2014:2) bahwa secara umum pemerintah adalah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.

Menurut Napitupulu (2012:9) pemerintah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan adalah lembaga atau organisasi, sedangkan pemerintahan adalah yang mengatur kekuasaan suatu Negara dalam proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah.

Ndraha (2010:6) pemerintah adalah gejala social, artinya terjadi didalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu didalam sebuah masyarakat.

Ada dua fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan sekunder . fungsi primer yaitu fungsi yang secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatsasikan dengan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder yaitu berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, sosial yang diperintah. (Ndraha,2015:76)

Menurut Finer (Dalam Kuper,2004:417) pemerintah itu lebih mengacu terhadap proses pengelolaan politik, yaitu gaya atau modal pengurus masalah-masalah yang umum serta pengelolaan sumber daya. Menurut Mac iver)Dalam Syafi'ie,2013:45) pemerintah itu ialah sebagai organisasi dari suatu kelompok orang yang memiliki kekuasaan, yang mana kekuasaa tadi diperintah.

d). Manajemen Pemerintah

Manajemen pemerintah disebut manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan.

Menurut Budi Supriyanto (2009:24) manajemen pemerintah adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Daft (2003:4) sebagai berikut: *“management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources”*. Yang artinya bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi.

Menurut G.R Terry (2010: 16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Hasibuan (2013:1) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.

Menurut Handoko (1998: 8) manajemen dapat didefinisikan bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian

(staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).

Menurut Plunket dkk (2005:5) mendefenisikan manajemen sebagai *“one or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (informations materials money and people)”*. Yang artinya manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorganisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang).

Menurut Tead (dalam Syafiie, 2011:2) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Millet (dalam Syafiie,2011:2) manajemen yakni proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Defenisi konsep manajemen yang menunjukkan secara ekaplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009:16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

Manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

- 1) Pembuatan Keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerja sama.
- 2) Pengkoordinasikan adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah pertentangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.
- 3) Pengarahan adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, pemberian petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
- 4) Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan pekerjaan serta hasil-hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
- 5) Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Menurut Stoner dan Freeman, Manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian, supaya organisasi dan proses

penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.(Sunyoto,2012).

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah suatu kegiatan atau usaha mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara inti manajemen, pemerintahan terletak pada proses penggerak untuk mencapai tujuan dimana terkait era tapa yang kenal dengan fungsi kepamong prajaan. Talizduhu Ndraha (2003) mendefenisikan manajemen pemerintah terlihat melalui ruang materi pokok kurikulumnya

1. Asas dan sistem pemerintahan
2. Hukum Tata Negara
3. Ekologi pemerintahan
4. Filsafat etika pemerintahan
5. Praktik penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan uraian para ahli diatas dapat disimpulkan manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

e). Fungsi-fungsi Manajemen

adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli diantaranya:

Menurut G.R Terry dalam bukunya principles of management (sukarna,2011:10) , membagi empat fungsi dasar manajemen , yaitu :

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan maam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimphkan terhadap setiap orang dalam hubungannyadengan pelaksanaan setaip kegiatan yang diharapkan.

c. Actuating (pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. Controlling (pengawasan)

Pengawasan dapat dirumumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Sedangkan menurut Handoko (2009:23) fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, leading dan controlling. Dan menurut Henry Frayol (2010:179) , manajer menjalankan fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan : perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.

Dari beberapa fungsi manajemen diatas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (planning). Setelah itu pengorganisasian (organizing). Selanjutnya menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda seperti actuating dan leading. Lalu fungsi yang terakhir dalam manajemen adalah pengendalian (controlling).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 2002:70).

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Pelaksanaan adalah kebijakan satu tahap dari proses kebijakan, menurut Agustino kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa pelaksanaan adalah memberikan otoritas program . kebijakan . keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran nyata (*tangle Output*) pelaksanaan mencakup tindakan –tindakan oleh sebagai actor , khususnya para birorkrat yang dimaksudkan membuat program berjalan. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana , teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan.

Pelaksanaan menurut westa (1985:17) merupakan aktivitas atau usaha –usaha yang dilaksanakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan . alat-alat yang diperlukan , siapa yang melaksanakan tempat pelaksanaan mulai dan bagaimana cara melaksanakan.

Menurut Abdullah (1987;5) pelaksanaan ialah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan di tetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan , langkah yang strategis maupun operasional atau

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai tujuan mencapai sasaran dari program yang di tetapkan semula.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. sebatier menjelaskan makna Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang , namun dapat berbentuk pola perintah-perintah atau keputusan –keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut mengidenfisikasikan masalah yang ingin di atasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai , dan berbagai , dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses pelaksanaan.

3. Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Control atau pengawasan adalah fungsi didalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak

dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan Robert J. Moclert berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Adapun Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Miltarin Sondole dkk bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Kemudian Mc. Farland memberikan definisi pengawasan sebagai berikut “control is process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, order objective, or policies” (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencan,tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. rencana (planning yang telah ditentukan)
- b. perintah (order) terhadap pelaksaan pekerjaan (performance)
- c. Tujuan
- d. kebijakan yang telah ditemtukan sebelumnya.

Menurut Manullang (2005:172) pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan standar pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Manullang (2012:16) dalam melaksanakan tugas pengawasan, untuk mempermudah proses pelaksanaannya dalam merealisir tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan sebagai berikuta) Menetapkan alat pengukur (standar) yakni penetapan patokan atau (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi.

- b) Mengadakan penilaian (evaluate) merupakan proses evaluasi, atau sering disebut dengan proses verifikasi akan ditemukan adanya tingkat pencapaian tujuan serta terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditentukan.

- c) Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) yaitu tahap mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

b. Macam-macam pengawasan

1. Pengawasan dari dalam organisasi

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini ingin berpindah atas nama pimpinan organisasi. aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. sebaliknya pimpinan dapat juga melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

2. Pengawasan dari luar organisasi (eksternal control)

Pengawasan eksternal (eksternal control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit

pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama organisasi itu karena permintaannya. disamping itu aparat pengawasan yang dilakukan atas nama organisasi tersebut dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar organisasi misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya.

3. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. adapun pelaksanaan pengawasan preventif dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan system prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b. membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- d. mengorganisasikan segala macam kegiatan penempatan pegawai pembagian pekerjaan.
- e. menentukan system koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- f. menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.maksud diadakannya pengawasan represif untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

C.Metode pengawasan

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan,baik dengan system inspektif,verifikativ maupun dengan system investigative. Metode ini dimaksud agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistic yang berisi gambar atau kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan.

c. Pengawasan Formal.

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan pimpinan dari organisasi itu.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan Informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

e. Pengawasan Administrative

Pengawasan Administrative adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos anggaran, pelaksanaan anggaran meliputi kepengurusan administrative dan pengurusan bendaharawan. Pengawasan material adalah untuk mengetahui dari apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan pengadaannya.

D. Prinsip-prinsip Pengawasan

Dengan melihat pengertian pengawasan yang kita ketahui dan agar supaya pengawasan itu dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu adanya prinsip-prinsip dasar dalam pengawasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. adanya rencana tertentu dalam pengawasan, karena dengan adanya rencana yang matang akan menjadi standar/alat pengukur berhasil atau tidaknya sebuah pengawasan.
- b. adanya pemberian instruksi atau perintah serta wewenang kepada bawahan.
- c. dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi, karena masing-masing kegiatan seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sebagainya membutuhkan system pengawasan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui sehingga cepat untuk dilaporkan.
- e. pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis.
- f. dapat merefleksikan pola organisasi, seperti setiap kegiatan karyawan harus tergambar dalam struktur organisasi atau terhadap setiap bagian yang ada harus punya standar daripada biaya dalam jumlah tertentu apabila terjadi penyimpangan, sehingga apabila penyimpangan melebihi standar disebut tidak wajar lagi.
- g. dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif, yakni segera mengetahui apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan tersebut serta siapa yang bertanggung jawab (Julitriarsa, 2001:104).

E. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat adalah :

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011, hal 45) adalah sebagai berikut :

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- b) melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c) mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Sukarna (2011, hal 112) tujuan pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
- c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai denganyang telah ditentukan.

- d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan).
- e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam rencana.
- f. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.
- Menurut Simbolon (2004:62) pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna(efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

No	Nama	Judul	Perbedaan
1	2	3	
1.	Yunita Erma AlmasdiSyahza Dan HennyIndrawati	Pengaruh Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Eknomi Pedesaan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan perkebunan kelapa sawit terhadap eknomi pedesaan masyarakat sekitar di kecamatan kepenuhan kabupaten rokan hulu sedangkan penulis untuk mengetahui pengawasan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakuka oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu.

1	2	3	4
2.	Pamela Eca	Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dinas pertanian dalam melakukan pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten kuantan singingi sedangkan penulis untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perkebunan kelapa sawit dilakukan pemerintah daerah kabupaten rokan hulu sudah sesuai dengan aturan yang ada.
3.	Bonardo Gultam Ronald	Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan perkebuna kelapa sawit di kabupaten sintang.	Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh dinas pertanian dan perkebunan kabupaten sintang dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit sedangkan penulis untuk mengetahui pengawasan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, maka peneliti ingin meneliti tentang Pelaksanaan pengawasan dinas perkebunan kabupaten rokan hulu dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dikecamatan tambusai kabupaten rokan hulu. kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar II.1 :Kerangka Pemikiran tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.



D. Konsep operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengukur pelaksanaan pengawasan dinas perkebunan kabupaten rokan hulu dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit

dikecamatan tambusai kabupaten rokan hulu. konsep operasional yang dikembangkan adalah mencakup kedalam beberapa indikator yang dapat dilihat dalam:

1. Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.
2. Dinas Perkebunan adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang prasarana, sarana dan perbenihan, pengembangan tanaman dan penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha, serta perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan sebagai penghasil minyak masak, minyak industri atau bahan bakar.
4. Menetapkan alat pengukur (standar) yakni penetapan patokan atau (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi.
5. Mengadakan penilaian (evaluate) merupakan proses evaluasi, atau sering disebut dengan proses verifikasi akan ditemukan adanya tingkat pencapaian tujuan serta terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditentukan.
6. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) yaitu tahap mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indicator
1	2	3	4
Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi	Pengawasan	1. menetapkan alat pengukur	1. Penentuan ukuran. 2. Dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan. 3. Ukuran keberhasilan suatu kegiatan.
		2. mengadakan penilaian	1. Pengukuran terhadap realita yang terjadi. 2. Membandingkan dengan ukuran standar yang telah ditetapkan. 3. Tingkat pencapaian tujuan serta terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditentukan.
		3. mengadakan tindakan perbaikan	Mencari jalan keluar untuk mengambil langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan bentuk survey, kategori bentuk dan penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kualitatif. metode ini digunakan untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor dalam moeleong (2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas perkebunan kelapa sawit kabupaten rokan hulu yang beralamat di jl.tuanku tambusai, kompleks perkantoran pemda rokan hulu, pematang berangan, pasir pangaraian kabupaten rokan hulu, riau 28558. alasan penulis memilih dinas tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan penulis lapangan penulis menemukan fakta bahwa kurang nya pengawasan dinas perkebunan terhadap pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit sehingga menimbulkan dampak negative bagi masyarakat.

C. Informan dan Key informan Penelitian

Menurut Andi (2010) informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Meleong (2006) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah atasan dan bawahan, dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus karena informan orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti. Adapun nama informan sebagai berikut:

Tabel III.1 Data Informan dan Profesi

No	Nama	Jabatan/Profesi
1	CH.Agung Nugroho	Kepala Dinas
2	Nur Ikhlas S.P	Sekretaris
3	Samsul Kamar S,Hut. M.Si	Kepala Bidang Perkebunan
4	Hanif	Pemilik Kebun

(Sumber : Modifikasi Penulis 2021)

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Dan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi, dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Kepala Bidang dinas perkebunan dan peternakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Observasi yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Yaitu mendapatkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan dinas perkebunan kabupaten rokan hulu dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.
- b. Wawancara yaitu mealkukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada c. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis ataupun dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Persiapan dan Penyusunan UP																	
2	Seminar UP																	
3	Revisi UP																	
4	Rekomendasi Survey																	
5	Survey Lapangan																	
6	Pengelolaan dan analisis Data																	
7	Konsultasi Revisi Skripsi																	
8	Ujian Komprehensif Skripsi																	
9	Revisi Skripsi																	
10	Penggandaan Skripsi																	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara yuridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian.

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100o-101o 52' Bujur Timur dan 00 – 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 km2. Secara fisik Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a). Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- b). Disebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan kecamatan XIII Koto Kampar dan kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
- c). Disebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- d).Disebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tapung kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan, mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 16 kecamatan. Kecamatan terluas adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

No	kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan	Luas (ha)
1	2	3	4	5
1	Rokan IV Koto	Rokan	14	932,79
2	Pendalian IV Koto	Pendalian	5	212,45
3	Tandun	Tandun	9	315,79
4	Kabun	Kabun	6	366,98
5	Ujung Batu	Ujung Batu	5	77,85
6	Rambah Samo	Rambah Samo	14	363,38
7	Rambah	Pasir Pengaraian	14	334,12
8	Rambah Hilir	Muara Rumbai	13	255,50
9	Bangun Purba	Tangun	7	156,22
10	Tambusai	Dalu-Dalu	12	664,28
11	Tambusai Utara	Rantau Kasai	11	1220,92
12	Kepenuhan	Kota Tengah	10	273,17
13	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	5	465,10
14	Kunto Darussalam	Kota Lama	10	584,27
15	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	3	151,78
16	Bonai Darussalam	Sontang	7	1213,53
	Jumlah			7588,13

(Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2020)

B. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 718.321 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 368.181 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 350.140 jiwa. Penduduk laki-laki di Kabupaten Rokan Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan sex ratio di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 105,15. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 sebesar 95 jiwa per kilometer persegi, dan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan dan 148 desa/kelurahan

Tabel IV.2 : Persebaran Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk(Ribu)	Kepadatan Penduduk	Jumlah Rumah (KK)
1	2	3	4	5
1	Rokan IV Koto	23,20	25	6406
2	Pendalian IV Koto	13,02	61	3296
3	Tandun	31,14	99	8484
4	Kabun	27,33	74	7519
5	Ujung Batu	48,15	619	18130
6	Rambah Samo	33,91	93	9860
7	Rambah	50,68	152	13897
8	Rambah Hilir	40,66	159	11448
9	Bangun Purba	19,18	123	4852
10	Tambusai	61,81	93	17028
11	Tambusai Utara	85,50	70	27106
12	Kepenuhan	25,31	93	7840
13	Kepenuhan Hulu	18,69	40	5406
14	Kunto Darussalam	43,12	74	16931
15	Pagaran Tapah Darussalam	11,32	75	4680
16	Bonai Darussalam	24,71	20	6927

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2020

Sedangkan jumlah penduduk menurut Desa/kelurahan dan jenis kelamin di kecamatan tambusai sebanyak 74.121 orang. Berikut tabelnya dibawah ini.

Tabel IV.3: Persebaran Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tambusai

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Tambusai Barat	2467	2379	4846
2	Sungai Kumango	2728	2685	5413
3	Batas	1440	1347	2787
4	Talikumain	1044	1065	2109
5	Tambusai Tengah	4037	3991	8028
6	Rantau Panjang	1148	1125	2273
7	Sialang Rindang	1483	1366	2849
8	Tambusai Timur	3509	3451	6960

9	Sukamaju	2387	2349	4736
10	Batang Kumu	7506	7165	14671
11	Tingkok	2280	2231	4511
12	Lubuk Soting	7531	7407	14938
	Jumlah	37560	36561	74121

Sumber: Kecamatan Tambusai Dalam Angka 2020

Selain kondisi masyarakat atau jumlah penduduk selanjutnya dijelaskan mengenai kepercayaan masyarakat dikecamatan tambusai yang dianut oleh masyarakat kecamatan tambusai, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1	2	3	4
1	Islam	35840	67,54%
2	Protestan	15978	30,11%
3	Katolik	1223	2,30%
4	Hindu	4	-7%
5	Budha	11	0,3%
6	Khong hu cu	1	2%
7	Lainnya	10	0,2%
	Jumlah	53.067	100%

Sumber: Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka 2020

C. Pemerintahan

Kecamatan Tambusai terdiri dari 12 kelurahan, 111 RW, 234 RT. Dua belas kelurahan tersebut adalah kelurahan Tambusai Barat, kelurahan Sungai Kumango, kelurahan Batas, kelurahan Talikumain, kelurahan Tambusai Tengah, kelurahan Rantau Panjang, kelurahan Sialang Rindang, kelurahan Tambusai Timur, kelurahan Sukamaju, kelurahan Batang Kumu, kelurahan Tingkok, dan kelurahan Lubuk Soting pada tahun 2019.

**Tabel IV.5: Jumlah Rumah Tangga(RT) dan Rumah Warga(RW)
kecamatan Tambusai 2019**

No	Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun/Lingkungan
1	2	3	4	5
1	Tambusai Barat	20	8	3
2	Sungai Kumango	23	9	5
3	Batas	15	8	3
4	Talikumain	14	7	3
5	Tambusai Tengah	31	16	9
6	Rantau Panjang	12	8	5
7	Sialang Rindang	20	6	-
8	Tambusai Timur	17	13	-
9	Sukamaju	25	13	6
10	Batang Kumu	33	6	6
11	Tingkok	12	8	-
12	Lubuk Soting	12	9	6
	Jumlah			

Sumber: Kecamatan Tambusai Dalam Angka 2020

D. Pendidikan

pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga, maupun kehidupan beragama, bernegara, dan berbangsa. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada dikawasan kelurahan di kecamatan Tambusai. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara, atau agama. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel IV.6: Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kecamatan Tambusai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	SD/MI	38
2	SMP/MTS	22
3	SMA/MA/SMK	12
	Total	72

Sumber: Kecamatan Tambusai dalam angka 2020

C. Gambaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu

1. Visi dan Misi

Adapun visi misi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dimana visi yaitu : terwujudnya peternakan dan perkebunan Roka Hulu yang maju, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan menuju peternak dan pekebun yang sejahtera dengan dukungan aparatur yang handal.

Sedangkan misi dari Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Rokan Hulu adalah :

- 1). Mengembangkan infrastruktur peternakan dan perkebunan.
- 2). Menumbuhkan dan mengembangkan agribisnis peternakan dan perkebunan yang maju dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
- 3). Meningkatkan produksi dan mutu hasil peternakan dan perkebunan secara efisien dan efektif.
- 4). Meningkatkan kapasitas SDM, penyusunan dan penyebaran informasi peternakan dan perkebunan.
- 5). Meningkatkan partisipasi swasta dan lembaga keuangan dalam bidang peternakan dan perkebunan.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan perkebunan Kabupaten

Rokan Hulu

2.1 Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi pembenihan dan perlindungan, seksi produksi perkebunan, seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang meyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perkebunan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi,fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perkebunan
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan
- e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan
- g. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan
- h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan
- i. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan

- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas, dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinassn lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Kepala seksi pembenihan dan perlindungan perkebunan

Kepala seksi pembenihan dan perlindungan perkebunan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pembenihan dan perlindungan perkebunan
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pembenihan dan perlindungan perkebunanc. Melakukan penyiapan bahan penyusuna kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan
- d. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaan/penggunaan benih di bidang perkebunan
- e. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan
- f. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan
- g. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan
- h. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan

- j. Melakukan pengelolaan data, penyiapan bahan pengendalian, pemantauan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan
- k. Melakukan penyiapan bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serta bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan
- l. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan
- m. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan
- n. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan
- o. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pembenihan dan perlindungan perkebunan, dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.3 Kepala seksi produksi perkebunan

Kepala seksi produksi perkebunan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi produksi perkebunan
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi produksi perkebunan

- c. Melakukan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan
- d. Melakukan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunane.
Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan
- f. Membuat telaah teknis tentang kelengkapan persyaratan untuk penerbitan izin usaha perkebunan untyk pengolahan di wilayah kabupaten
- g. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan serta pengawasan atau pengendalian penyaluran, pemanfaatan kredit perkebunan
- h. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan
- i. Melaksanakan bimbingan teknis budidaya perkebunan
- j. Melakukan survey dan identifikasi calon petani dan alon lokasi kegiatan produksi perkebunan
- k. Melaksanakan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman perkebunan
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi produksi perkebunan, dan
- m. Melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fumgsinya.

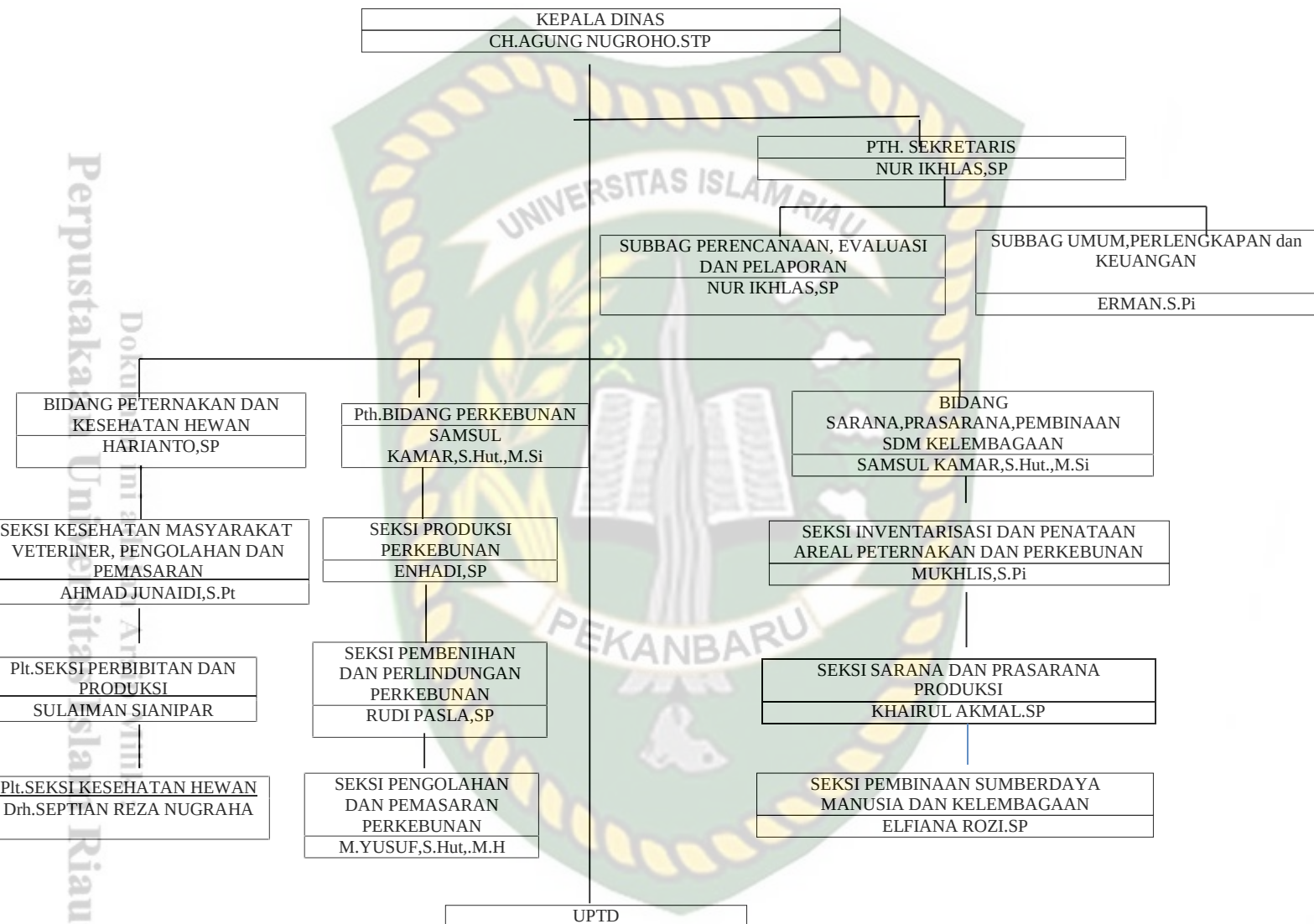
2.4 Kepala seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan

Kepala seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan pengaggaran pada seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan

- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan.
- c. Melakukan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan
- d. Melakukan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan
- e. Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan
- f. Melakukan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan
- g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan
- h. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan
- i. Melakukan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang permukaan
- j. Melakukan penyebaran informasi dan penerapan teknologi pasca panen pengolahan hasil perkebunan
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan, dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Perangkat Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu





Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten rokan hulu, kemudian di kemukakan tentang pokok pembahasan penelitian ini yaitu yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam bab ini juga akan diuraikan berbagai antara lain, identitas responden yang mana akan digunakan untuk untuk menggambarkan karakteristik responden. Kemudian deskripsi tentang hasil kuisioner yang telah disebarkan pada responden yang dilanjutkan dengan analisis data yang sudah di dapat dan di peroleh dari hasil turun ke lapangan atau lokasi penelitian secara langsung dan bertemu dengan semua responden.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab v dibawah ini :

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Sekretaris Dinas Peternakan Dan

Perkebunan, Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, Camat Kecamatan Tambusai, Pemilik Kebun.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin di sini ialah untuk menggambarkan banyaknya responden yang berjenis laki-laki dan perempuan. Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	9	90%
2	Perempuan	1	10%
	Jumlah	10	100%

(Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2021)

2. Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokkan umur responden dengan cara tingkatan gambaran dari umur responden penelitian. Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini :

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	31-40	3	30%
2	41-50	6	60%
3	51 Tahun Keatas	1	10%
	Jumlah	10	100%

(Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021)

Dari tabel V.2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 41-50 tahun yakni 6 orang atau 60%, dan di ikuti oleh umur diantara 31-40 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 30%, kemudian paling sedikit umur 51 tahun keatas sebanyak 1 orang atau sama dengan 10%. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori umur yang produktif dalam pengumpulan data responden.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan disini menggambarkan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh. Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kusioner ini adalah mengenai informasi pengelompokkan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	3	30%
2	Strata Satu (S1)	5	50%
3	Strata Dua (S2)	2	20%
	Jumlah	10	100%

(Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021)

Dari tabel V.3 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu (S1) yang berjumlah 5 orang dengan 50%, kemudian disusul tamatan Strata Dua (S2) sebanyak 2 orang atau sama dengan 20%, dan yang terakhir adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA). Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah yang tamatan Strata Satu (S1) dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Hasil penelitian ini berasal dari informan yang berasal dari Kepala Dinas peternakan dan perkebunan, Sekretaris Kepala Dinas, Kepala Bidang Perkebunan, Camat, dan Pemilik Kebun. Hasil penelitian dapat dilihat dari tiga indikator yang meliputi menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

a. Menetapkan Alat Pengukur

bila seorang hendak mengukur jarak/menilai suatu pekerjaan, hal ini baru dapat dilakukan bila terdapat alat pengukur atau penilainya. Alat pengukur atau penilai tadi harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian juga halnya dalam pengawasan. kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan dari para pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur (standar).

Standar ini adalah mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak. Yaitu dapat berupa rencana, program kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah merupakan fase pertama dari pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan yaitu bapak CH. Agung Netroho sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan pada hari tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WIB mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dinas peternakan dan perkebunan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak CH Agung Nugroho memberikan jawabannya:

“ bentuk pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berupa pengawasan perkebunan swasta dan rakyat, berisi tentang perizinan, kemitraan, penilaian kebun, dan RSPO dan ISPO.

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah bapak ada mengawasi kegiatan Disnakhbun dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak CH.Agung Nugroho memberikan jawabannya :

“saya menerima laporan tertulis satu tahun sekali, juga saya mengawasi kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan cara menerima laporan setiap satu tahun sekali. Sedangkan untuk perkebunan yang sudah dibangun akan dilakukan pengawasan dan pembinaan periodik tiga tahun sekali”.

Pertanyaan selanjutnya apakah suatu kegiatan atau hasil yang ditetapkan sebagai standart dalam melakukan suatu kegiatan, bapak CH.Agung Nugroho memberikan jawabannya :

“Sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di bidang perkebunan, Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan perbup Nomor 64 tahun 2019 tentang pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebunan, bidang sarana prasarana dan pembinaan sumber daya manusia”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan yaitu Bapak CH.Agung Nugroho, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas peternakan dan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu melakukan suatu kegiatan berpedoman pada perbup Nomor 64 tahun 2019 tentang pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebunan, bidang sarana prasarana dan pembinaan sumber daya manusia. Bentuk pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berupa pengawasan perkebunan perusahaan dan masyarakat tentang perizinan, kemitraan, penilaian kebun, dan RSPO dan ISPO. Dari wawancara dengan bapak CH Aung

Nugroho kita bisa lihat bahwa Kepala dinas mendapat laporan tertulis lebih kurang satu tahun sekali atau untuk perkebunan yang sudah dibangun akan dilakukan pengawasan dan pembinaan periodik tiga tahun sekali. Dalam hal ini dinas perkebunan dinas peternakan dan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan kegiatan monitoring evaluasi secara terjadwal untuk langsung turun ke lapangan.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Nur ikhlas selaku Sekretaris mengenai apakah suatu hasil yang ditetapkan sebagai standar dalam melakukan suatu kegiatan, bapak Nur Ikhlas memberikan jawabannya :

“ kami khususnya aparat Dinas melakukan tugas dan kewajibannya yang berpedoman pada perbup Nomor 64 tahun 2019, walaupun belum secara optimal untuk mencapai standar yang ditetapkan”.

Dari hasil wawancara bersama bapak Nur Ikhlas sebagai Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, alat ukur/standar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam pengelolaan perkebunan berpedoman pada Perbup Nomor 64 tahun 2019, dan dalam pelaksanaannya masih belum optimal untuk memenuhi standar tersebut. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan berjalan dengan baik, bapak Nur Ikhlas memberikan jawabannya:

“ sejauh ini pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah baik, walaupun masih ada sedikit kendala dalam dalam hal ini, sumber daya manusia, biaya, dan waktu sehingga hasil yang didapatkan belum optimal”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan bersama bapak Nur Ikhlas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berjalan dengan baik, namun dalam prosesnya masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM), biaya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan yang dinilai masih kurang hingga waktu dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan tersebut masih belum terjadwal sehingga hasil yang didapatkan belum optimal. Pertanyaan selanjutnya bagaimana tanggapan terhadap pelaksanaan pengawasan dalam perkebunan kelapa sawit, bapak Nur Ikhlas memberikan jawabannya:

“ seperti yang sudah saya katakan sebelumnya sudah berjalan dengan baik, tapi hasil yang didapatkan belum sesuai dengan target atau tujuan yang berarti belum optimal, ini yang masih kami musyawarahkan dengan kepala dinas dan staff, dan berharap pihak atas juga secepatnya menanggapi masalah ini ”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berjalan baik, tetapi hasil yang diinginkan belum mencapai tujuan atau masih kurang optimal, dikarenakan masih terdapat kendala seperti sdm, biaya, dan waktu, sehingga perlu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kepada pihak pemerintah seharusnya lebih tanggap lagi terhadap permasalahan ini.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada Bapak Samsul Kamar S,Hut.M.Si sebagai Kepala Bidang Perkebunan mengenai apakah suatu hasil yang ditetapkan

sebagai standar dalam melakukan kegiatan pengawasan, bapak Samsul Kamar S,Hut.M.Si memberikan jawabannya :

“ Dalam melakukan tugas dan kewajibannya kami berpedoman pada perbup Nomor 64 tahun 2019”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menganalisis bahwa standar semua kegiatan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berpedoman pada Perbup Nomor 64 tahun 2019 tentang pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perkebunan, bidang sarana prasarana dan pembinaan sumber daya manusia. Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Samsul Kamar S.Hut.M.Si mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Samsul Kamar memberikan jawabannya :

“ Adapun bentuk pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu berupa pengawasan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat, yang didalamnya berisi tentang perizinan, kemitraan, penilaian kebun, dan RSPO dan ISPO”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menganalisis bahwa bentuk pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini adalah berupa pengawasan perkebunan swasta atau perusahaan dan perkebunan rakyat atau masyarakat, dimana didalamnya terdapat perizinan, kemitraan, penilaian kebun, RSPO, dan ISPO. Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Samsul Kamar S.Hut.M.Si mengenai bagaimana tanggapan

bapak terhadap pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Samsul Kamar memberikan jawabannya :

“ pengawasan yang dilaksanakan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik, akan tetapi hasilnya yang terlihat belum sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kendala yang sering ditemukan ialah sdm, biaya, maupun dari masyarakat atau oknum perusahaan itu sendiri ”.

Dari wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menganalisis bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan perkebunan kelapa sawit masih terdapat kendala yang sering ditemui seperti kurangnya sdm, biaya, hingga waktu untuk menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pengawasan walaupun sudah berjalan baik tetapi hasilnya belum optimal. Kemudian dari pihak masyarakat sendiri juga masih ada yang belum mengetahui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau terdapat perusahaan oknum yang melakukan penyimpangan.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Hanif sebagai pemilik kebun atau masyarakat mengenai bagaimana bapak membuka dan mengelola perkebunan kelapa sawit, bapak Hanif memberikan jawabannya:

“ pada mulanya lahan saya ini bukan perkebunan sawit melainkan perkebunan karet namun karena mengingat karet yang saya tanam usianya sudah tua dan mulai sedikit menghasilkan getah maka saya memilih untuk beralih ke perkebunan sawit, melihat hasilnya yang menggiurkan. Dan juga pengelolaan kelapa sawit cukup mudah, karena hanya melakukan pemanenan dua minggu satu kali saja ”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit memberikan hasil yang sangat menjanjikan karena bisa meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengelolaannya juga cukup mudah, bahkan mereka tidak khawatir untuk membeli lahan lebih luas lagi untuk ditanami kelapa sawit, dan juga bisa bantu mempekerjakan kerabatnya yang lain untuk membantu penghasilannya. Kemudian standar dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu seharusnya meliputi menyusun kebijakan, menentukan standar waktu dalam pengawasan, sosialisasi dan adanya pembagian tugas dalam pengawasan.

b. mengadakan penilaian

mengadakan penilaian ini berarti membandingkan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur/ standar tadi. Dalam tahap ini akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan bapak CH.Agung Nograho sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan pada hari tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WIB mengenai apakah menurut bapak kinerja staff dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bapak CH Agung Nugroho memberikan jawabannya:

“sejauh ini kinerja staff disnakhun dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit cukup baik, meskipun masih ada staf yang kurang paham terhadap tugasnya di Disnakhun”

Dalam wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih ada terdapat beberapa staff yang kurang paham

terhadap tugas dan kewajibannya di Disnakhbun, sehingga kinerjanya masih kurang baik dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, tetapi masih terhitung baik. Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak CH Agung Nugroho mengenai bagaimana bentuk mengadakan penilaian kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak CH. Agung Nugroho memberikan jawaban :

“dalam pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan penilaian terhadap suatu pekerjaan/kegiatan. bentuk penilaian tersebut ialah berupa laporan tertulis, laporan lisan, dan pengawasan langsung”.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menganalisis bahwa bentuk penilaian dalam kegiatan pengawasan berupa laporan tertulis, laporan lisan, dan pengawasan langsung. Hal tersebut seharusnya dapat membantu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditentukan. Namun berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, masih terdapat ketidaksesuaian hasil laporan dilapangan dengan hasil data yg diterima. Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak CH. Agung Nugroho mengenai apakah bapak ada mendiskusikan masalah pengelolaan perkebunan ini kepada staff disnakhbun, bapak CH. Agung Nugroho memberikan jawabannya :

“ saya dan kepala bidang Perkebunan sudah membahas masalah ini, staff dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasannya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah baik tetapi hasilnya belum optimal, karena masih terdapat kendala baik berupa sdm, biaya, waktu, masyarakat, maupun oknum perusahaan yg melakukan penyimpangan. Dan saya juga akan

mengajukan semua kendala ini kepada pemerintah atas agar diberikan kebijakan atau solusi untuk masalah ini”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa bapak CH Agung Nugroho sebagai kepala dinas, bapak Samsul Kamar S.Hut M.Si serta staff yang lainnya sudah membahas masalah yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan perkebunan kelapa sawit seperti kurangnya sdm untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan tersebut, kurangnya biaya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan tersebut, waktu yang masih belum terjadwal dengan baik ,kemudian masalah dari pihak masyarakat maupun oknum perusahaan. Maka saya mengajukan masalah tersebut kepada pemerintah atas untuk memberikan solusi tersebut.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Nur Ikhlas sebagai Sekretaris mengenai apakah menurut bapak kinerja staff dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bapak Nur Ikhlas memberikan jawaban :

“ kinerja staff disnabun dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit cukup baik, meskipun terdapat beberapa staf yang masih kurang paham terhadap tugasnya di Disnabun”

Dalam wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa didalam melaksanakan kegiatan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit kinerja staff cukup baik karena karena masih terdapat beberapa staff yang kurang paham dengan tugas dan kewajibannya. Semoga kedepannya kinerja staff bisa ditingkatkan lagi dan dapat memahami tugas dan kewajibannya di Disnabun. Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Nur ikhlas mengenai apakah ada kelemahan dalam

mengadakan penilaian terhadap pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Nur Ikhlas memberikan jawaban :

“Kelemahan dalam penilaian suatu pekerjaan/kegiatan berupa laporan tertulis, lisan, dan pengawasan langsung ialah terjadinya kekeliruan dan tidak sesuai hasil dilapangan dengan hasil data yang diterima”

Dalam wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk penilaian dalam kegiatan pengawasan berupa laporan tertulis, laporan lisan, dan pengawasan langsung. Hal tersebut seharusnya dapat membantu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Kemudian membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditentukan. Namun berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan , masih terdapat ketidaksesuaian hasil laporan dilapangan dengan hasil data yg diterima.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Samsul Kamar S.Hut M.Si mengenai bagaimana bentuk mengadakan penilaian kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Samsul Kamar memberikan jawaban :

“Betuk penilaian kebun dilakukan sebanyak satu kali dalam tiga tahun sesuai dengan kelas nya masing-masing. Dalam bentuk laporan tertulis, laporan lisan, dan pengawasan langsung”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa penilaian dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilakukan sebanyak satu kali dalam tiga tahun sesuai dengan kelasnya masing-masing. penilain tersebut dirasakan masih

kurang efektif dan optimal. Sedangkan laporan-laporan seperti itu bisa saja direkayasa oleh pihak tertentu. Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Samsul Kamar mengenai apa saja kendala yang bapak temui selama mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Samsul Kamar memberikan jawabannya :

“ selama mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, saya melihat hambatan seperti staff yang kurang baik dalam menjalankan tugasnya, menjalankan tugasnya dengan ceroboh tidak meneliti kembali dengan benar data akurat dilapangan dengan data hasil yang diterima, tidak menjadwalkan dengan baik kegiatan pengawasan. Kemudian belum optimal memberikan sosialisasi kepada beberapa masyarakat yg masih belum mengetahui standar pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik seperti apa, dan kurang tegasnya pengawasan dalam mengontrol oknum perusahaan yang melakukan penyimpangan ”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak kendala dalam proses melakukan pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit disebabkan beberapa aspek seperti kurangnya dalam meneliti kembali data dilapangan dengan data hasil yang didapatkan serta belum terjadwal dengan jadwal kegiatan dalam pengawasan, kemudian masih kurang optimal dalam memberikan sosialisasi kepada sebagian masyarakat yang belum pahan dengan standar pengelolaan perkebunan yang baik, dan kurang tegas terhadap oknum perusahaan yang melakukan penyimpangan.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Hanif sebagai pemilik kebun atau masyarakat mengenai apa saja kendala yang bapak hadapi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Hanif memberikan jawaban :

“ kendalanya seperti faktor cuaca yang tidak menentu, menyemprotkan racun pada rumput atau semak yang ada dikebun pada musim kemarau, karena rumput yang sudah mengering akan mudah terbakar, hasil panen saya berkurang akhir-akhir ini mungkin disebabkan kurang pemberian pupuk”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menganalisis bahwa banyak faktor kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit seperti faktor cuaca yang tidak menentu kadang hujan kadang panas, memberikan semprot racun ke semak pada musim kemarau karena mudah terbakar dan menyebar tanaman yang lainnya, dan masyarakat harus diberikan sosialisasi lebih mengenai pemilihan pupuk yang sesuai dengan anjuran pemerintah agar berbuah maksimal. Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Hanif mengenai apakah menurut bapak kinerja yang dilakukan pengawas Dinas perkebunan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, kemudia bapak hanif memberikan jawabannya:

“ saya sebenarnya masih belum paham dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik sesuai dengan standar itu seperti apa, saya harap pengawas dinas perkebunan Rokan Hulu lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang itu “.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menganalisis bahwa pengawas dinas perkebunan belum melakukan kinerja sesuai dengan standar, terlihat masih terdapat sebagian mayarakat yang masih belum mengetahui cara pengelolaan perkebunan yang baik seperti apa, dan diharapkan untuk kedepannya lebih sering lagi memberikan sosialisasi, misalnya tentang pemilihan pupuk sawit yang tepat untuk meningkatkan daya tahan tanaman sawit menjadi lebih kuat bahkan dalam kondisi ekstrem, serta tentang pemilihan bibit

kelapa sawit yang akan ditanam butuh keahlian dan ketelitian karena jika tidak tanaman tidak akan berbuah maksimal.

c. mengadakan perbaikan

tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan/kegiatan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan bapak CH.Agung Nograho sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan pada hari tanggal 28 September 2021 pukul 10.00 WIB mengenai bagaimana mengevaluasi suatu pekerjaan yang dilakukan staff tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan:

“staff yang pekerjaannya tidak sesuai dengan standar akan diambil tindakan koreksi terhadap pekerjaannya seperti memberikan pembinaan dan apabila melakukan penyimpangan diberi sanksi”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk staf yang pekerjaan masih belum atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka perlu diberikan koreksi dalam hal pembinaan atau membimbing cara kinerja yang sesuai dengan standar itu seperti apa, dan apabila terdapat staff yang melakukan penyimpangan dalam pekerjaannya harus diberi sanksi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak CH Agung Nugroho mengenai bagaimana dengan pengelolaan perkebunan yang dilakukan perusahaan maupun swadaya yang tidak sesuai dengan standar, bapak CH Agung Nugroho memberikan jawaban:

“pengelolaan perkebunan yang dilakukan baik perusahaan maupun swadaya yang belum memenuhi standar tidak akan dikualifikasikan/ditepikan melainkan akan dibimbing dan dibina untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga berhasil memenuhi standar”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, penulis dapat menganalisis bahwa perkebunan perusahaan maupun swadaya atau masyarakat dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang belum memenuhi standar tidak akan dikualifikasikan, tetapi akan dibimbing dan diberi pembinaan agar kapasitasnya semakin ditingkatkan hingga berhasil memenuhi standar.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada bapak Nur Ikhlas sebagai Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan mengenai apakah suatu waktu standar yang telah ditetapkan bisa berubah, bapak Nur Ikhlas memberikan jawabannya :

“ tentu bisa apabila suatu waktu kebijakan yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan kondisi realita yang terjadi, atau kebijakannya dikaji ulang kembali untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu kebijakan suatu waktu akan bisa diubah disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk mencapai tujuan atau mengkaji ulang kembali kebijakan dengan kondisi yang terjadi saat itu.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada Bapak Samsul Kamar sebagai Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu mengenai tanggapan bapak terhadap kendala dalam mengawasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Samsul Kamar memberikan jawabannya:

“kurangnya peranan sdm sehingga terlaksananya pengawasan yang belum efektif,serta dana atau biaya yang dikucurkan untuk pengawasan sehingga hanya dapat melakukan satu kali pengawasan secara langsung.semoga pemerintah atas mengkaji ulang kembali kebijakan untuk kebutuhan mencapai tujuan”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa pengawas dinas perkebunan hanya dapat melakukan satu kali pengawasan secara langsung. Hal ini dikarenakan masih kurangnya peranan sumber daya manusia (sdm) serta dana atau biaya yang dianggarkan kecil tidak sebanding dengan luasnya perkebunan yang akan diawasi sehingga terlaksananya kegiatan dalam pengawasan belum berjalan secara efektif.

Pertanyaan selanjutnya penulis ajukan kepada Bapak Hanif sebagai pemilik kebun atau masyarakat mengenai bagaimana tanggapan bapak terhadap beberapa oknum perusahaan yang melakukan penyimpangan dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, bapak Hanif memberikan jawabannya:

“ pihak pemerintah melakukan tindakan perbaikan, seperti pemberian peringatan dan sanksi tegas,tetapi pada nyatanya sanksi yang diberikan belum tegas kepada para perusahaan kelapa sawit”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa belum adanya standar waktu yang efektif dalam pengawasan langsung lapangan dan juga belum adanya sosialisasi yang dilakukan dan juga sanksi yang belum tegas terhadap perusahaan kelapa sawit, karena masih terdapat beberapa perusahaan yang lolos dari pemantauan pengawasan.

D. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan, maka ditemukan bahwa dinas perkebunan kabupaten rokan hulu belum optimal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi tidak berjalannya pengawasan secara efisien dan optimal. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan dinas perkebunan dan peternakan kabupaten Rokan Hulu belum dilakukan secara maksimal.
2. Kurangnya peran sdm untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dilapangan
3. Dana/ biaya yang dianggarkan untuk melakukan kegiatan pengawasan dari organisasi sedikit.
4. Sanksi yang kurang tegas kepada perusahaan yang melakukan penyimpangan.

E. Hasil Analisis

Setelah dilakukan penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini serta observasi lapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal dan efektif. Karena pada kenyataannya masih banyak bentuk hasil kinerja yang belum sesuai dengan standar atau hasil yang dicapai belum mencapai standar yang ditetapkan serta masih banyak ditemukannya penyimpangan-penyimpangan baik dalam melakukan tugas pengawasan maupun dari oknum perusahaan itu sendiri. Adapun penyebabnya dikarenakan :

Pertama, pengawas dinas perkebunan dan peternakan belum maksimal dalam mensosialisasikan tentang dinas perkebunan dan peternakan dan mensosialisasikan fungsi dinas perkebunan dan peternakan mengenai pengelolaan perkebunan yang sesuai dengan standar, kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan pengawasan dalam kegiatan operasional tersebut.

Kedua, pengawas dinas perkebunan dan peternakan belum memahami tugas dan fungsi dinas perkebunan dan peternakan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, pengawas dinas tidak dapat menjalankan tugas pada setiap program atau kebijakan dinas perkebunan dan peternakan . hal tersebut

dikarenakan ketidaktahuan pengawas dinas perkebunan mengenai setiap bidang program atau kebijakan dinas perkebunan dan perkebunan.

Ketiga, kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak secara rutin dan efektif, dana yang dikucurkan untuk membiayai kegiatan operasional sangat kecil tidak sebanding dengan luasnya kawasan yang diawasi, hingga sanksi yang diberikan untuk membuat jera para penyimpang belum tegas.

Keempat, karyawan kurang menerima bimbingan dan pembinaan dari pembina dinas perkebunan dan peternakan.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan menurut teori Manullang mengenai Pengawasan, Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Pelaksanaan Pengawasan di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum dapat dikatakan berjalan secara efektif. Karena menurut teori tersebut suatu organisasi dapat dikatakan berjalan secara efektif dinilai melalui tiga indikator yaitu menetapkan alat pengukur (standar), mengadakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan. Namun pada nyatanya pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara efektif. Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Mulai dari tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas dinas kepada karyawan dan masyarakat dan mengenai tugas yang sesuai dengan standar yang dicapai. Dan dalam pelaksanaan pengawasan terdapat kendala baik dari kecilnya anggaran, kurangnya sdm sehingga program atau tugas dinas perkebunan dan peternakan tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pengawas dinas perkebunan kepada masyarakat mengenai pengelolaan perkebunan yang sesuai dengan standar, kurangnya sumber daya manusia (Sdm) untuk melaksanakan pengawasan dalam kegiatan operasional tersebut.
2. kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak secara rutin dan efektif, dana yang dikucurkan untuk membiayai kegiatan operasional sangat kecil tidak sebanding dengan luasnya kawasan yang diawasi, hingga sanksi yang diberikan untuk membuat jera para penyimpang belum tegas.
3. Adapun faktor yang menghambat berjalannya pengawasan dinas perkebunan kabupaten rokan hulu adalah sebagai berikut :
 - a. Belum maksimal sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan perkebunan yang sesuai dengan standar

- b. Belum ada penetapan standar waktu yang efektif dalam pengawasan langsung kelapangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak secara rutin dan efektif.
- d. Kurangnya peran sdm untuk melaksanakan pengawasan dalam kegiatan.
- e. Kurangnya dana/biaya yang dianggarkan untuk membiayai kegiatan operasional kecil tidak sebanding dengan luasnya kawasan yang diawasi. Karena Sehingga menyebabkan dinas perkebunan hanya dapat melakukan satu kali pengawasan secara langsung.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak pemerintah atau dinas perkebunan kabupaten rokan hulu perlu memberikan pembinaan terhadap pengawas dinas perkebunan kabupaten rokan hulu. Agar pengawas dinas perkebunan dapat menjalankan tugasnya lebih terarah dan terstruktur.
2. Dengan adanya pembinaan dapat membantu pengawas dalam pelaksanaan kegiatannya semakin baik dan efektif.
3. Kepada pihak pemerintah atau dinas perkebunan kabupaten rokan hulu agar lebih jelas memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan standar.

4. Sebaiknya pengawas dinas perkebunan perlu melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam menjalankan fungsinya mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
5. Pembinaan kepada perkebunan perusahaan atau perkebunan swadaya perlu ditingkatkan lagi dan merata supaya perkebunan yang sudah dikualifikasi atau ditepikan karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan akan tetap dibimbing sehingga mencapai standar tersebut.
6. Pihak Disnakhun dan pemerintah yang terkait harus mengkaji ulang kembali kebijakan dana atau biaya yang dianggarkan untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar sesuai dan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan.
7. Perlu ditingkatkan lagi kinerja dalam mengawasi oknum-oknum yang akan melakukan segala cara untuk melakukan penyimpangan, dan harus bertindak dengan memberi sanksi yang tegas kepada oknum yang sudah melakukan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2011) *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Djati Julitriarsa, (1998). *Manajemen Umum*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Manullang, 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Manullang, 2012 *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta. Gajah Mada.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*, Bandung. CV Indra Prahasta
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan tujuh
- Napitupulu, Paiman. 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan-Pelayanan Public & Customer Satisfaction*, Bandung, PT. Alumni
- Ndaraha Talizduhu. 2005. *Kybernologi beberapa konstuksi utam*, Jakarta: Rineka Sirao Crendatia Center
- Ndraha Talizduhu. 2011. *Kybernologi 1(Ilmue Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru
- Rauf, Rahyunir. 2018 *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Zanaf
- Robert J. Mockler. 1996. *The Management Control Proces*, dialihbahasakan oleh Handoko, Englewood Cliffs, Prentice Hal
- Sukarna.(2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, PT. Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2005. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor urut 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jurnal :

Barokah, I. K. A., Islam, J. E., Islam, U., & Syarif, N. (2011). *Prospek Bisnis Kelapa Sawit pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*.

Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2012). *DI PROVINSI SUMATRA UTARA*

Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Hidayat, W., & Yahya, S. (2015). Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu , Riau dimulai dari tanggal 13 Februari hingga 13 Mei 2012 . Kegiatan penelitian menyangkut aspek teknik dan manajerial damenjadi karyawan harian lepas (KHL), supervisor dan asisten kebun . *Keg.Bul. Agrohorti*, 3(2), 177–184.

Masyarakat, K., Alternatif, S., Rokan, K., Basri, D. H., & Si, M. (n.d.). *Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu Oleh: Drs. H. Basri, M.Si*.

Yunita, E., Syahza, A., Indrawati, H., Studi, P., Ekonomi, P., & Riau, U. (n.d.). *EFFECT OF DEVELOPMENT OF OIL PALM ON RURAL ECONOMY IN THE DISTRICT FULLNES*.1–11.